

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU
Jl. SAWERIGADING, KELURAHAN SABE,KECAMATANBELOPA UTARA**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga buku “ Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kab.Luwu TA.2025” dapat diterbitkan sebagai wujud partisipasi seluruh jajaran kesehatan lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.

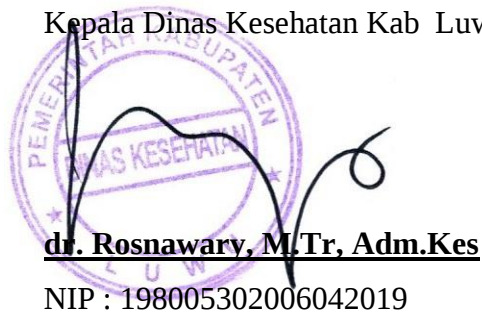
Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kab.Luwu, dimana Dinas Kesehatan merupakan Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu yang melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Luwu untuk hidup sehat.

Kami menyadari bahwa kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga Negara dan merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga kerjasama antara Instansi Pemerintah dan masyarakat sangat diharapkan.

Mengingat bahwa suatu pekerjaan atau tugas yang bagaimanapun berat dan sulitnya, dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang memuaskan bila dilandasi oleh niat baik, tekad untuk maju dan selalu berbuat lebih baik dari sebelumnya secara ikhlas, maka kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terbitnya buku Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih.

Belopa, Juni 2024

Kepala Dinas Kesehatan Kab Luwu



dr. Rosnawary, M.Tr, Adm.Kes
NIP : 198005302006042019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	7
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	41
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	74
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	78
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	111
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	115
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	115
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	124
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	132
BAB V. PENUTUP	170

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2024	8
Tabel 2.2	Capaian dan target kinerja SPM Dinas Kesehatan Tahun 2022-2025 Kabupaten Luwu	63
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023	68
Tabel 2.4	Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025	80
Tabel 2.5	Usulan Progran dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025	112
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu	126
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan dan Penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah, dalam hal ini penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun. Sedangkan Renja Perangkat Daerah adalah rencana kerja perangkat daerah periode 1 tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan tetap memperhatikan Rencana Kerja Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi acuan Dinas Kesehatan Dina Kesehatan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi

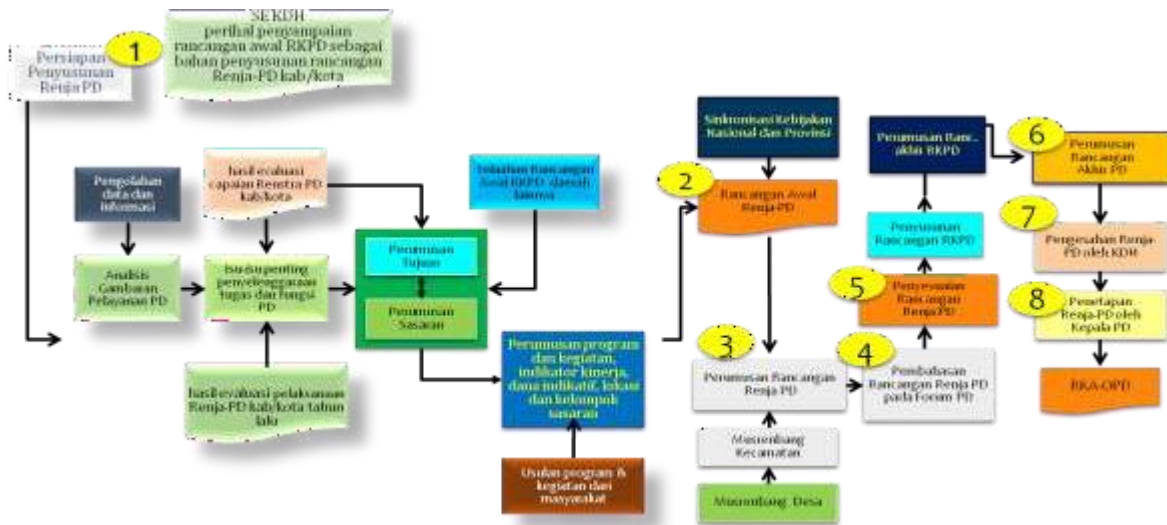
Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu periode 2025 -2029. Adapun tahapan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renja yang meliputi; Persiapan penyusunan rancangan keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- c. Penyusunan rancangan Renja untuk penyempurnaan rancangan awal Renja yang selanjutnya dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- e. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana untuk penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD
- f. Penetapan Renja

Bagan alur penyusunan rencana kerja perangkat daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alur Rancangan Rencana Kerja

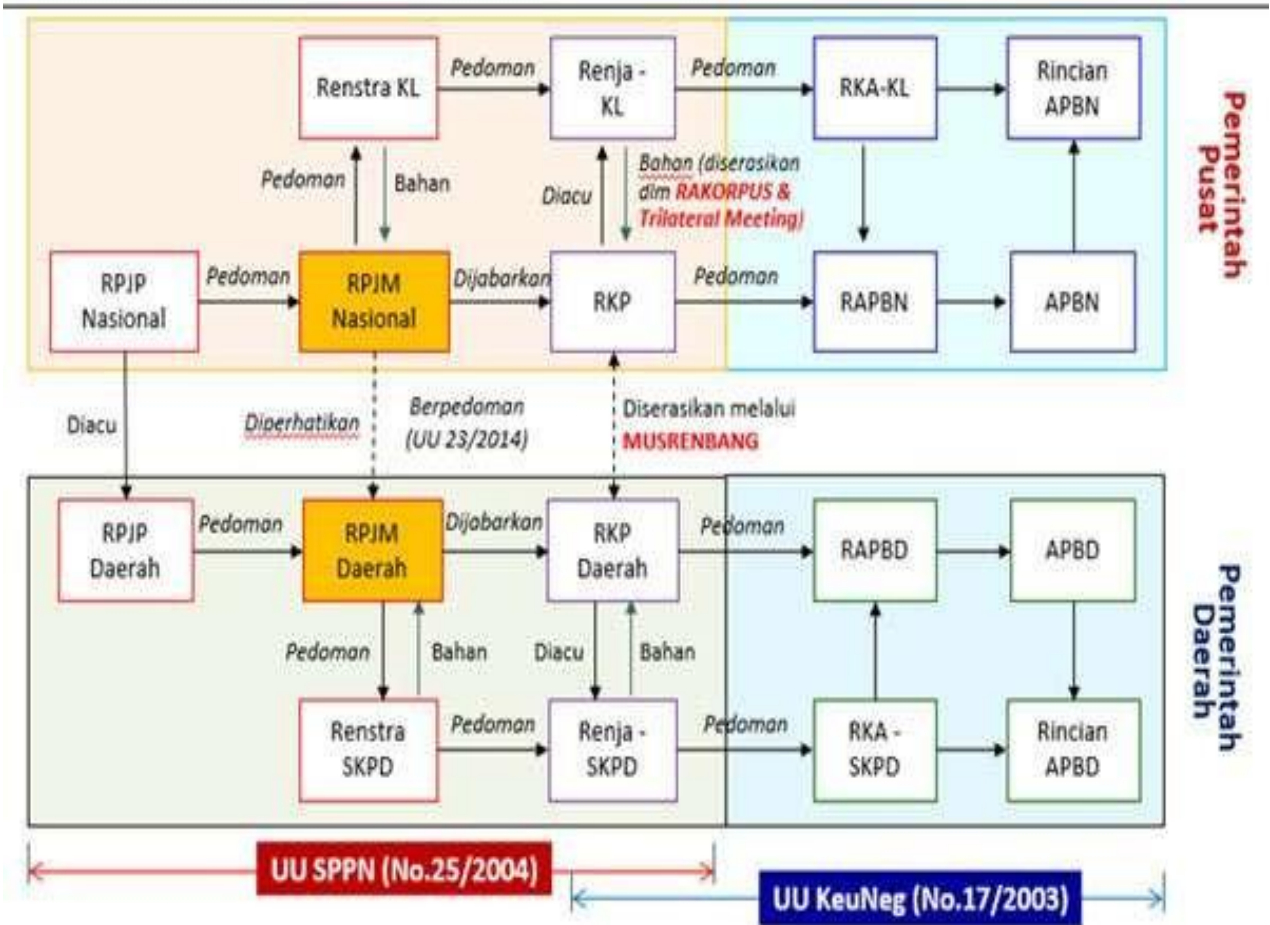


Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam rangka perencanaan yang sistematis sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja).

Rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2025 – 2026 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Adapun alur Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tertuang dalam gambar berikut :

Gambar 1.2
Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah



Sumber: Undang-undang No.25 Tahun 2004 dan undang-undang No. 17 Tahun 2003

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193;
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
- h. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor No. 4 tahun 2019 tentang Standar Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1355);
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2025 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 914);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 1781);
- o. Keputusan Menteri Kesehatan No. 671/MENKES/SK/VI/2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan
- p. Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7);
- s. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
- t. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 122);
- u. Peraturan Bupati Luwu Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 130);
- v. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026;
- w. Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja perangkat daerah ini adalah :

- Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.
- Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kab.Luwu
- Memudahkan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran
- Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program – program yang telah direncanakan.

1.4 Sitematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

Bagian ini menjelaskan tentang evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bagian ini menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu di sertai dengan sumber pendanaan dan rencana kerja tahun berikutnya

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan rencana kerja ataupun ketersediaan penganggaran, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Kesehatan tahun 2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan atau realisasi APBD. Berdasarkan data dalam platform monitoring dan evaluasi pemerintah Kabupaten Luwu, rata-rata realisasi kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2023 termasuk dalam kategori sangat tinggi, yakni sebesar 97,57 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.619.725.348,00 atau 78,90 persen. Adapun rincian data sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Hasil Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,80 Angka	594.468.651.896	69,51 Angka	0	72,02 Angka	64.579.672.259							
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	0,00 %	594.468.651.896	0,00 %	0	0,00 %	64.579.672.259							
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	99,00%	2.844.505.126	0,00	0	99,00%	343.007.700	100,00%	326.991.950	30,36%	326.991.950	30,66%	11,50%	
		5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	856.739.710	0	0	2	191.432.650	2	188.504.350	2	188.504.350	25,00%	22,00%	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	90.410.224	0	0	1	15.043.700	1	14.037.900	1	14.037.900	25,00%	15,53%	Tercapai
		5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4	60.214.300	0	0	1	12.767.600	1	12.579.700	1	12.579.700	25,00%	20,89%	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu Tahun (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	93.668.784	0	0	1	9.722.700	1	8.797.600	1	8.797.600	25,00%	9,39%	Tercapai
		5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	58.656.320	0	0	1	11.999.000	1	9.070.650	1	9.070.650	25,00%	15,46%	Tercapai
		5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	1.684.815.788	0	0	4	102.042.050	4	94.001.750	4	94.001.750	57,14%	5,58%	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100,00%	573.446.484.468	0,00	0	100,00%	61.821.161.087	100,00%	61.581.592.871	12,43%	61.581.592.871	12,43%	10,74%		
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39.696	570.294.227.528	0	0	1.500	61.360.510.487	1.500	61.135.797.271	1.500	61.135.797.271	3,78%	10,72%	Tercapai	
		5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.841	3.012.480.000	0	0	1	415.920.000	1	412.320.000	1	412.320.000	0,04%	13,69%	Tercapai	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	43.408.240	0	0	1	4.522.400	1	4.312.400	1	4.312.400	25,00%	9,93%	Tercapai
		5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	12	19.997.900	0	0	1	2.019.000	1	2.019.000	1	2.019.000	8,33%	10,10%	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	56	76.370.800	0	0	14	38.189.200	14	27.144.200	14	27.144.200	25,00%	35,54%	Tercapai
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	99,00%	115.200.000	0,00	0	99,00%	15.600.000	100,00%	15.600.000	16,67%	15.600.000	16,84%	13,54%	
		5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	115.200.000	0	0	1	15.600.000	1	15.600.000	1	15.600.000	16,67%	13,54%	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00%	739.821.700	0,00	0	100,00%	99.706.500	100,00%	79.948.435	18,54%	79.948.435	18,54%	10,81%	
		5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	80	619.011.000	0	0	3	74.700.000	3	56.945.000	3	56.945.000	3,75%	9,20%	Tercapai
		5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan (Orang)	150	120.810.700	0	0	50	25.006.500	50	23.003.435	50	23.003.435	33,33%	19,04%	Tercapai
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daera	100,00%	4.714.084.908	0,00	0	100,00%	841.925.020	160,72%	823.180.100	39,43%	823.180.100	39,43%	17,46%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	51	7.050.000	0	0	1	5.430.000	2	5.428.000	2	5.428.000	3,92%	76,99%	Melampaui
		5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan (Paket)	12	236.468.700	0	0	1	143.764.000	2	143.550.000	2	143.550.000	16,58%	60,71%	Melampaui
		5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan (Paket)	36	72.000.000	0	0	36	9.980.000	31	9.979.600	31	9.979.600	86,11%	13,86%	Belum Tercapai
		5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan (Paket)	48	60.000.200	0	0	1	6.999.740	2	6.999.600	2	6.999.600	4,17%	11,67%	Melampaui

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48	250.000.000	0	0	48	30.000.000	96	29.550.000	96	29.550.000	200,00%	11,82%	Melampaui
		5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	48	177.347.820	0	0	1	15.756.900	2	15.756.900	2	15.756.900	4,17%	8,88%	Melampaui
		5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	660	170.640.000	0	0	1	30.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	0,30%	7,03%	Melampaui
		5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	648	3.740.578.188	0	0	150	599.994.380	1	599.916.000	1	599.916.000	0,15%	16,04%	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	212.000.000	0,00	0	92,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		
		5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	67	212.000.000	0	0	4	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Tidak Terlaksana	
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	99,00%	7.170.055.838	0,00	0	100,00%	841.866.632	68,06%	789.320.469	1,17%	789.320.469	1,17%	11,01%		
		5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat (Laporan)	72	183.056.240	0	0	24	16.800.000	1	16.800.000	1	16.800.000	1,39%	9,18%	Belum Tercapai	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	1.164.117.198	0	0	1	257.466.632	1	225.220.469	1	225.220.469	2,08%	19,35%	Tercapai
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.348	5.822.882.400	0	0	1	567.600.000	1	547.300.000	1	547.300.000	0,03%	9,40%	Tercapai
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	5.226.499.856	0,00	0	100,00%	616.405.320	100,00%	587.434.328	4,10%	587.434.328	4,10%	11,24%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	184	3.295.298.800	0	0	15	190.415.651	15	181.964.328	15	181.964.328	8,15%	5,52%	Tercapai
		5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.916	1.931.201.056	0	0	1	425.989.669	1	405.470.000	1	405.470.000	0,05%	21,00%	Tercapai
2	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan			Indeks kepuasan masyarakat atas layanan kesehatan di Kabupaten Luwu	87,29 Indeks	#####	82,46 Indeks	0	84,90 Indeks	432.846.555.896							
				Persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai target	100 %		100 %		100 %								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023				
						6			7		8		9			10=7+9		11=10/6x100	
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100,00 %	1.016.591.343.835	0,00 %	0	100,00 %	105.933.798.394									
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik	80,97%	176.898.788.525	0,00	0	80,00%	21.232.841.009	112,50%	15.779.955.539	48,58%	15.779.955.539	60,72%	8,92%			
		1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana,Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	15	7.404.603.000	0	0	5	5.889.506.480	5	5.544.606.528	5	5.544.606.528	33,33%	74,88%	Tercapai		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatandan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	25	11.677.952.000	0	0	2	1.197.895.271	2	1.193.777.350	2	1.193.777.350	8,00%	10,22%	Tercapai
		1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	8	51.998.363.947	0	0	17	4.537.653.592	17	0	17	0	212,50%	0,00%	Tercapai
		1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatanyang Disediakan (Unit)	38	27.210.000.000	0	0	1	300.000.026	1	281.962.439	1	281.962.439	2,63%	1,04%	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	8	36.580.156.748	0	0	5	1.851.715.100	5	1.587.424.000	5	1.587.424.000	62,50%	4,34%	Tercapai
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (Paket)	88	24.705.289.746	0	0	1	3.460.910.520	1	3.211.566.318	1	3.211.566.318	1,14%	13,00%	Tercapai
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (Paket)	15	16.404.147.102	0	0	5	3.820.160.020	10	3.786.099.154	10	3.786.099.154	66,67%	23,08%	Melampaui
		1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala AlatKesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.200	918.275.982	0	0	22	175.000.000	22	174.519.750	22	174.519.750	1,83%	19,01%	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan	100,00%	838.723.532.720	0,00	0	99,00%	84.569.708.885	0,00%	54.583.803.640	0,00%	54.583.803.640	0,00%	6,51%		
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	28.096	482.686.000	0	0	5.572	1.586.325.970	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai	
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	26.722	21.663.935.000	0	0	5.374	103.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai	
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	27.920	917.725.000	0	0	5.408	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Tidak Terlaksana	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar (Orang)	117.629	350.240.360	0	0	28.106	839.448.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar (Orang)	118.071	336.410.940	0	0	58.899	821.598.800	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	222.198	0	0	0	222.198	480.664.830	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	110.383	310.606.004	0	0	28.540	580.154.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	70.524	0	0	0	70.524	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Tidak Terlaksana
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	6.579	0	0	0	6.579	952.092.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang denganRisiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yangMendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	28.360	320.269.650	0	0	8.672	662.896.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	4	42.786.884.648	0	0	1	4.125.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GiziMasyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	88	6.924.581.660	0	0	22	710.446.000	0	3.456.923.640	0	3.456.923.640	0,00%	49,92%	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja danOlahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	4	308.746.320	0	0	1	221.170.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan (Dokumen)	88	1.709.873.994	0	0	22	425.102.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	16	268.290.800	0	0	4	19.989.650	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan (Dokumen)	88	926.200.000	0	0	22	304.434.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	871	0	0	0	871	259.070.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa danNAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang MendapatkanPelayanan Kesehatan (Orang)	88	534.640.000	0	0	0	239.928.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Tercapai
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Khusus (Dokumen)	1.680	843.717.500	0	0	1	1.047.181.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	88	6.194.052.200	0	0	1	4.843.475.900	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat (Dokumen)	88	522.920.319.482	0	0	1	55.998.081.774	0	51.126.880.000	0	51.126.880.000	0,00%	9,78%	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	28	5.442.760.120	0	0	7	600.000.063	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional PelayananPuskesmas (Dokumen)	88	213.503.414.312	0	0	22	13.671.133.551	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi diKabupaten/Kota (Unit)	88	11.978.178.730	0	0	22	199.392.347	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	22,00Unit	487.917.390	0,00	0	22,00Unit	81.248.500	50,00%	0	1,56%	0	7,10%	0,00%	
		1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data danInformasi Kesehatan (Dokumen)	6	209.996.790	0	0	1	60.610.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Belum Tercapai
		1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SistemInformasi Kesehatan (Dokumen)	32	277.920.600	0	0	1	20.638.500	1	0	1	0	3,13%	0,00%	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin rumah sakit kelas C dan D yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	99,00%	481.105.200	0,00	0	100,00%	50.000.000	50,00%	0	366,67%	0	366,67%	0,00%	
		1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	3	481.105.200	0	0	22	50.000.000	11	0	11	0	366,67%	0,00%	Belum Tercapai
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	77,27 %	1.018.229.631.305	0,00 %	0	77,27 %	108.315.510.834							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten	84,00%	1.044.265.170	0,00	0	83,00%	179.467.070	100,00%	0	25,00%	0	30,12%	0,00%	
		1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	8	1.044.265.170	0	0	2	179.467.070	2	0	2	0	25,00%	0,00%	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang telah mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	100,00%	594.022.300	0,00	0	100,00%	2.202.245.370	0,00%	2.060.441.170	0,00%	2.060.441.170	0,00%	346,86%	
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.440	594.022.300	0	0	50	2.202.245.370	0	2.060.441.170	0	2.060.441.170	0,00%	346,86%	Belum Tercapai
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	100,00 %	1.020.770.184.319	0,00 %	0	100,00 %	108.757.117.434							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, (UMOT) yang telah mendapat izin	65,00Angka	379.120.660	0,00	0	65,00Angka	99.496.600	100,00%	92.552.926	50,00%	92.552.926	76,92%	24,41%	
		1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	4	379.120.660	0	0	2	99.496.600	2	92.552.926	2	92.552.926	50,00%	24,41%	Tercapai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang telah diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	0,00Angka	2.161.432.354	0,00	0	0,00Angka	342.110.000	0,00%	305.833.800	0,00%	305.833.800	0,00%	14,15%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	200	2.161.432.354	0	0	60	342.110.000	0	305.833.800	0	305.833.800	0,00%	14,15%	Belum Tercapai
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	100,00 %	1.023.113.324.015	0,00 %	0	100,00 %	109.840.129.234							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	100,00%	2.197.129.996	0,00	0	100,00%	119.920.000	100,00%	119.710.000	1,14%	119.710.000	1,14%	5,45%	
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	88	2.197.129.996	0	0	1	119.920.000	1	119.710.000	1	119.710.000	1,14%	5,45%	Tercapai
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan UKBM	63,00%	146.009.700	0,00	0	62,00%	963.091.800	2.000,00%	473.360.120	22,73%	473.360.120	36,66%	324,20%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2019 s/d 2024 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=7+9		11=10/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	88	146.009.700	0	0	1	963.091.800	20	473.360.120	20	473.360.120	22,73%	324,20%	Melampaui	
Total Target (RP)									174.419.801.493			137.619.725.348						
Rata-rata capaian kinerja (%)											97,57	78,90						
Predikat kinerja											ST	T						

2.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu. Indikator kinerjanya adalah cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan target program 100% dan realisasi kinerja 100%. Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Dinas Kesehatan dan bersifat rutin meliputi:

- A. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dicapai dengan indikator output Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang disusun dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 343.007.700 terserap sebesar Rp.326.991.950 atau sebesar 95,33%.
- B. Administrasi keuangan perangkat daerah dicapai dengan indikator output Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 61.821.161.087 terserap Rp.61.581.592.871 atau sebesar 99,61%.
- C. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dicapai dengan indikator output cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.15.600.000 terserap Rp.15.600.000 atau sebesar 100%.
- D. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dicapai dengan indikator output persentase ASN dengan predikat kinerja baik dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.99.706.500 terserap sebesar Rp. 79.948.435 atau 80,18%.
- E. Administrasi umum perangkat daerah dicapai dengan indikator output cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.841.925.020 terserap sebesar Rp. 823.180.100 atau 97,77%.
- F. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dicapai dengan indikator output cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 841.866.632 terserap sebesar Rp. 789.320.469 atau 93,75%.
- G. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dicapai

dengan indikator output cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.616.405.320 terserap sebesar Rp. 587.434.328 atau 97,77%.

2.1.2. Program pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini dilaksanakan dalam mendukung kinerja standar pelayanan minimal bidang Kesehatan, hal ini diukur dengan indikator persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan yaitu 100% dengan realisasi capaian 89,73%.

- a. Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dicapai dengan indikator output Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya dalam kondisi baik dengan capaian indikator kinerja sebesar 48,58% dengan anggaran sebesar Rp. 21.232.841.009 terserap sebesar Rp. 15.779.955.539 atau 74,31%.
- b. Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat daerah dicapai dengan indikator output Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan dengan capaian indikator kinerja sebesar 80% dengan anggaran sebesar Rp. 84.569.708.885 terserap sebesar Rp. 54.583.803.640 atau 64,54%.
- c. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dicapai dengan indikator output persentase sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten yang telah mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis dengan capaian indikator kinerja sebesar 75,33% dengan anggaran sebesar Rp. 2.202.245.370 terserap sebesar Rp. 2.060.441.170 atau 93,56%.

2.1.3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini dilaksanakan dalam mendukung kinerja pelayanan Kesehatan bidang farmasi, alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah tangga, hal ini diukur dengan indikator persentase pemenuhan izin sediaan farmasi yaitu 100% dengan realisasi capaian 100%.

- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dicapai dengan indikator output Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, (UMOT) yang telah mendapat izin dengan capaian indikator kinerja sebesar 65 Unit dengan anggaran sebesar Rp.

99.496.600 terserap sebesar Rp. 92.552.926 atau 93,02%.

- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dicapai dengan indikator output Jumlah Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang telah diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi dengan anggaran sebesar Rp. 342.110.000 terserap sebesar Rp. 305.833.800 atau 89,39%.

2.1.4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini dilaksanakan dalam mendukung kinerja pelayanan Kesehatan bidang dalam rangka melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di suatu Kabupaten, hal ini diukur dengan indikator persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS yaitu 100% dengan realisasi capaian 100%.

- a. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta Masyarakat dan lintas sektor Tingkat daerah Kabupaten/Kota dicapai dengan indikator output Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 119.920.000 terserap sebesar Rp. 100.000.000 atau 83,39%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan operasional kegiatan di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan, fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat, pengawasan dan pengendalian kesehatan serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Dengan peraturan Bupati Luwu Nomor 38 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Luwu, Dinas Kesehatan mempunyai struktur dan tugas pokok sebagai berikut :

2.2.1. KEPALA DINAS KESEHATAN

- 2.2.1.1. Kepala Dinas Kesehatan membawahi:
 - 2.2.1.1.1. Sekretariat;
 - 2.2.1.1.2. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 2.2.1.1.3. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
 - 2.2.1.1.4. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 2.2.1.1.5. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - 2.2.1.1.6. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 2.2.1.1.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - 2.2.1.1.8. Kelompok Jabatan Fungsional

a) SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program
 - c. Sub Bagian Keuangan

II.1. Sub Bagian Umum

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas Membantu Sekretaris melaksanakan urusan administrasi umum dan perkantoran serta kehumasan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang umum;
 - b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
 - c. Penyusunan Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;
 - d. Penatausahaan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta

pelaksanaan pada Sub Bagian Umum;

- f. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- g. Pembagian tugas, pemberian, petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan administrasi Umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, perpustakaan, dan kearsipan;
- i. Pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
- j. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu dinas;
- k. sianggaran Subbagian umum; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.2. Sub Bagian Program

- 1) Sub bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kinerja, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan data-data yang berkaitan dengan penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi kinerja.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun dan penelenggaraan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang program;
 - b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja pada Sub Bagian ;
 - c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Sub Bagian Program;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan program,

rencana Kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;

- e. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA);
- g. Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
- h. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- i. Pengkoordinasian dan Penyusunan Standar pelayanan Publik (SPP);
- j. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bagian Program;
- k. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- l. Pembagian tugas, pemerian petunjuk serta pengevaluasian hasil Kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. Penghimpunan dan pengdokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat dinas;
- n. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas;
- p. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian program.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.3 Sub. Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusangaji.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka

Asatu (1), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan penelenggaraan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan keuangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja pada Sub Keuangan;
- c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Sub Bagian dan Keuangan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelolakeuangan dinas;
- e. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bagian dan Keuangan;
- f. Pembagian tugas, pemerian petunjuk serta pengevaluasian hasil Kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas;
- h. Pelaksanaan Pengajuan, perubahan, pemotongan dan pendistribusian gaji pegawai;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian program dan keuangan;
- k. Penyusunan laporan keuangan dan Laporan kinerja (LKJ) dinas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b). BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesehatan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1),

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- d. Perumusan Kebijakan teknis bidang Kesehatan Masyarakat;
- e. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
- g. Penyusunan perencanaan bidang Kesehatan Masyarakat;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- i. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- j. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
- k. pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- l. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- m. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi:

- a. Sub koordinasi Kesehatan Keluarga dan Gizi

- b. Sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Sub Koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Masing-masing Sub Koordinasi dipimpin oleh seorang sub koordinator seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

III.1 Sub koordinator kesehatan keluarga dan gizi

1. Kepala Sub koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1) Kepala sub koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan pada sub koordinasi kesehatan keluarga dan Gizi;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada sub koordinasi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada sub koordinasi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada sub koordinasi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - f. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - i. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban

pelaksanaan program kegiatan pada sub koordinasi KesehatanKeluarga dan Gizi; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

III.2 Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Kepala Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas membantu kepala bidan melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Kepala Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seksiPromosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan pada sub koordinasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III.3 Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

1. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada sub koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada sub koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada sub koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 - d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan pada sub koordinasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
 - f. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - g. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - h. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban

pelaksanaan program kegiatan pada seub koordinasi KesehatanLingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c.) Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit:

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit;
2. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP)kerja Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Penyusunan perencanaan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesesehatan Jiwa;
6. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
7. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
8. Pelaksanaan tugas Pembantuan di Bidang Pencegahan Dan

Pengendalian Penyakit; dan

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Membawahi:

- Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi
- Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Masing-masing sub koordinasi dipimpin oleh sub koordinator dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

IV.1. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi

- 1) Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi;
 - d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
 - f. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;

- g. Memberikan bimbingan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
- h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang surveilans dan imunisasi;
- i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Surveilans dan Imunisasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

IV.2 Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

- 1) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - f. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan

dan pengendalian penyakit menular;

- g. Memberikan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

IV.3 Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

- 1) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan jiwa;
- g. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- h. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan jiwa;
- i. Memberikan bimbingan teknis di bidang pencegahan penyakit tidak menular;
- j. Memberikan bimbingan teknis di bidang kesehatan jiwa;
- k. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- l. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kesehatan jiwa;
- m. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d.) BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- 10. Perumusan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Kesehatan;
- 11. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 12. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja

dan standar kompetensi jabatan Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Penyusunan perencanaan bidang Pelayanan Kesehatan;

13. Penyusunan perencanaan bidang Pelayanan Kesehatan;
14. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
15. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
16. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
17. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
18. Pelaksanaan tugas Pembantuan di Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pelayanan Kesehatan Membawahi ;

1. Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer
2. Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional
3. Sub Koordinasi Fasyankes dan Peningkatan Mutu

Masing-masing Sub Koordinasi sebagaimana dimaksud ini dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

V.1 Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer

- 1) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan Penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, peminaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Primer.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - e. Mengkoordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan primer;
 - f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan primer;
 - g. Melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan primer;
 - h. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer;
 - i. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang pelayanan kesehatan primer;
 - j. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan pada seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V.2 Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional

- 1) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan tradisional.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
 - d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;
 - f. Melaksanakan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;
 - g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;
 - h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;
 - i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

V.3 Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu

Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu Penyiapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu

- 1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
 - b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinator Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
 - d. Menyusun Analisa Jabatan, beban Kerja dan peta Jabatan pada seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
 - e. Melaksanakan kebijakan operasional bidang peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
 - f. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
 - h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan;
 - i. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
 - j. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e). BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Kesehatan.

- a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang Sumber Daya Kesehatan;
2. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
4. Penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya Kesehatan;
5. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
6. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Kesehatan;
7. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya Kesehatan;
8. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Kesehatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Sumber Daya Kesehatan Membawahi ;

- a. Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- b. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Sub Koordinator Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

VI.1. Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- 1) Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

- b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- e. Memberikan bimbingan teknis dibidang pelayanan kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- f. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian kepada fasilitas dan pengolahan kefarmasian, makanan dan minuman;
- g. Melaksanakan pendataan, registrasi dan perizinan pada fasilitas farmasi, industri rumah tangga dan PDAM/industri air minum;
- h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- i. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

VI.2. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 1) Sub koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Sub Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- b. Menyusun Perencanaan program kegiatan pada Sub Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Menyusun Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan pada Sub Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. Menyiapkan bahan Perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
- h. Pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Memberikan bimbingan teknis serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- j. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- k. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. UPTD Puskesmas

UPTD Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan

fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas,

2.2.2 Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* *working plant*. Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tidak akan jauh dengan tahun tahun sebelumnya, karena dinas kesehatan melakukan perencanaan berpedoman pada tugas dan fungsi yaitu melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina kesehatan masyarakat serta pengembangan sumber daya kesehatan. Dalam upaya penanggulangan masalah-masalah kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu merencanakan program-program yang mengutamakan kegiatan pada upaya promotif dan preventif, yang dilaksanakan secara serasi dengan tidak mengurangi upaya kuratif dan rehabilitatif. Prioritas tinggi akan diberikan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit menular, dan perbaikan status gizi serta penanggulangan kasus gizi buruk (termasuk kegiatan surveilans dan kewaspadaan dini), promosi kesehatan, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dan pembangunan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. Pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

Tabel 2.2. Capaian dan target Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Tahun 2022-2025 Kabupaten Luwu

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	76.66	75.13	100	100	Tidak semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan sehingga standar pelayanan ANC tidak terpenuhi, akses yang sulit, SDM terbatas dan tidak merata
2	Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan ibu bersalin,	100	100	100	100	74.88	79.27	100	100	Akses pelayanan kesehatan yang sulit, terbatasnya SDM.
3	Cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	79.26	78.27	100	100	Kesulitan menjangkau akses pelayanan kesehatan seperti Puskesmas Latimojong, Basesangtempe, Basesangtempe Utara, Walenrang Barat

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan balita	100	100	100	100	71.07	73.24	100	100	Akses layanan yang sulit dijangkau, pemanfaatan posyandu belum optimal, kurangnya kesadaran ibu untuk membawa anaknya ke posyandu, beberapa posyandu belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sesuai standar, pemberdayaan masyarakat yang belum optimal
5	Cakupan anak usia pendidikan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	61.56	72.53	100	100	Pada saat pemberian pelayanan kesehatan ada beberapa siswa yang tidak hadir dikarenakan sakit atau izin

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Cakupan penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	100	100	70.13	76.24	100	100	Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, BHP medis yang tidak sesuai dengan usia roduktif, beberapa posbindu PTM belum aktif,
7	Cakupan penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	49.94	77.91	100	100	Tidak semua desa mempunyai posyandu usila sehingga berpengaruh pada cakupan pelayanan usila

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100	100	76.66	75.13	100	100	Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan , rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi, BHP medis yang disediakan tidak sesuai dengan usia reprodutif
9	Cakupan penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	100	100	100	100	100	100	100	Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan , rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi, BHP medis yang disediakan tidak sesuai dengan usia reprodutif

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Cakupan orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100	91.6	96,56	100	100	Masih ada masyarakat yang tidak mau memeriksakan keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.
11	Cakupan orang terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	100	100	100	100	91.04	90,41	100	100	Masyarakat masih ada yang tidak rutin minum obat TB secara teratur
12	Cakupan orang dengan risiko HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	100	100	100	94.89	92,93	100	100	Masih adanya masyarakat yang tidak mau melakukan skrining

Dari tabel 2.2 di atas dapat disimpulkan bahwa dari 12 (dua belas) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), 11 (sebelas) indikator belum mencapai target 100 %, dan 1 (satu) indikator yang sudah mencapai target 100%. capaian terendah ada pada pelayanan kesehatan usia lanjut yang hanya mencapai 75.13% capaian dari target 100%. Rendahnya capaian pelayanan Kesehatan penderita hipertensi disebabkan oleh banyak faktor, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya deteksi dini dan pengobatan hipertensi: Banyak masyarakat belum memahami risiko hipertensi dan pentingnya kontrol tekanan darah secara teratur.
2. Pencatatan dan pelaporan tidak dilakukan secara berkala dapat menjadi kendala capaian spm hipertensi
3. Terbatasnya saran dan prasarana seperti bangunan Posyandu yang belum permanen.
4. Tebatasnya jumlah Sumber daya Manusia Kesehatan (SDM) di Puskesmas.

Upaya yang dilakukan pada kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye kesehatan, edukasi dan penyuluhan. Peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, dengan menyediakan sumber daya yang memadai, pelatihan bagi tenaga kesehatan dan perbaikan manajemen data.

Data pencapaian pada tabel 2.3 juga memberikan gambaran bahwa derajat Kesehatan masyarakat ditentukan oleh banyak faktor. Derajat kesehatan memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi.

**Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023
Kabupaten Luwu**

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Puskesmas dan Puskesmas Pembantu					
	Jumlah Puskesmas	22	22	22	22	22
	Jumlah Puskesmas Pembantu	112	112	120	122	124
	Jumlah seluruh kecamatan	22	22	22	22	22
	Jumlah desa / kelurahan	227	227	227	227	227
	Cakupan Puskesmas	100	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Cakupan Puskesmas Pembantu	49,34	49,34	52,86	53,74	54,63
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Bayi					
	Jumlah kematian bayi pada 1 tahun tertentu.	57	48	53	80	83
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6273	6232	6417	6054	5410
	Angka Kematian Bayi (AKB)	9,09	7,70	8,26	13,21	15,34
	AKHB (1-AKB)	0,9909	0,9923	0,9917	0,9868	0,98447
3.	Angka usia harapan hidup	70,19	70,34	70,44	70,75	71,00
4.	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup					
	Jumlah kematian balita pada 1 tahun tertentu.	61	58	62	85	88
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6273	6232	6417	6054	5410
	Rasio	9,72	9,33	9,66	14,04	16,27
5.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup					
	Jumlah kematian neonatal pada 1 tahun tertentu.	41	31	42	64	85
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6273	6232	6417	6054	5410
	Rasio	6,54	4,97	6,55	10,57	15,71
6.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup					
	Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena Hamil, bersalin dan Nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 Thn	5	10	15	11	7
	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama.	6273	6232	6417	6054	5410
	AKI	79,71	160,46	233,75	181,70	129,39
7.	Jumlah Posyandu dan Balita					
	Jumlah Posyandu	427	427	430	430	432
	Jumlah Balita	29306	29814	29831	30340	33029
	Rasio per satuan balita	14,57	14,32	14,41	14,17	13,08
8.	Puskesmas, Poliklinik dan Pustu					
	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	230	234	237	237	238
	Jumlah Penduduk	363754	365608	367454	369820	372161
	Rasio per satuan penduduk					
9.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk					
	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	0	0	0	0

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI/Swasta	1	1	1	1	1
	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
	Jumlah seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2
	Jumlah Penduduk	363754	365608	367454	369820	372161
	Rasio	0,000055	0,000055	0,000054	0,000054	0,000054
10.	Dokter					
	Jumlah Dokter	35	48	44	57	74
	Jumlah Penduduk	363754	365608	367454	369820	372161
	Rasio per satuan penduduk	0,00010	0,00013	0,00012	0,00015	0,00020
11.	Tenaga Paramedis					
	Jumlah Tenaga paramedis	352	417	441	501	594
	Jumlah penduduk	363754	365608	367454	369820	372161
	Rasio Tenaga Paramedis per satuan penduduk	0,00097	0,00114	0,00120	0,00135	0,00160
12.	Komplikasi kebidanan yang ditangani					
	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	1188	1224	1398	917	1369
	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayahkerja pada kurun waktu yang sama	1188	1224	1398	917	1369
	Cakupan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan					
	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6237	6229	6410	6064	5404
	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayahkerja dalam kurun waktu yang sama	7046	7166	7166	8252	7127
	Cakupan	88,52	86,92	89,45	73,49	75,82
14.	Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)					
	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	221	226	221	221	221
	Jumlah Desa/Kelurahan	227	227	227	227	227
	Cakupan	97,36	99,56	97,36	97,36	97,36

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
15.	Balita Gizi Buruk mendapat perawatan					
	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja	30	187	72	50	31
	Jumlah seluruh balita gizi buruk disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	30	187	72	50	31
	Cakupan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Persentase balita gizi buruk	0,02	0,1	0,2	0,2	0,12
17.	Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak					
	Jumlah anak usia 1 Tahun yang mendapat Imunisasi Campak di suatu wilayah selama 1 Tahun	6768	6155	6533	7206	6717
	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama.	7554	6372	6693	6449	6798
	Persentase	89,59	96,59	97,61	111,74	98,81
18.	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani					
	Jumlah penderita Pneumonia balita	158	28	20	343	548
	Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani	158	28	20	343	548
	Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.	1338	1376	1376	1361	1412
	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA					
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukandan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	336	258	594	258	416
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama	603	624	624	670	684
	Cakupan	55,72	41,35	95,19	38,51	60,82
20.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)					
	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	640	462	526	797	762
	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	363754	365608	367454	369820	372161

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase	175,94	126,36	143,15	215,51	204,75
21.	Tingkat kematian karena tuberkulosis(per 100.000 penduduk)					
	Jumlah pasien TB yang meninggal	24	26	47	54	38
	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	363754	365608	367454	369820	372161
	Persentase	6,60	7,11	12,79	14,60	10,21
22.	Kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS					
	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	640	462	526	797	762
	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	1005	1040	1040	1118	1140
	Persentase	63,68	44,42	50,58	71,29	66,84
23.	Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS					
	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	231	119	146	209	290
	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	300	247	321	437	366
	Persentase	77,00	48,18	45,48	47,83	79,23
24.	Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD					
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. kerja selama 1 Tahun	28	6	31	72	43
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	28	6	31	72	43
	Cakupan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25.	Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida					
	Banyaknya balita yang pada malam sebelum survey tidur menggunakan kelambu	0	0	0	0	0
	Jumlah balita	29306	29814	29831	30340	33029
	Persentase Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi					
	Jumlah pasien HIV dan AIDS disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu	16	32	22	56	44

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama	363754	365608	367454	369820	372161
	Persentase	0,0044	0,0088	0,0060	0,0151	0,0118
27.	Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin					
	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	183314	134881	153476	198596	NA
	Jumlah seluruh penduduk miskin di Kabupaten	253441	199303	270868	263280	250839
	Cakupan	72,33	67,68	56,66	75,43	NA
28.	Cakupan kunjungan bayi					
	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standardi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6070	6150	6271	6007	5424
	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padakurun waktu yang sama	6273	6232	6417	6054	5410
	Cakupan	96,76	98,68	97,72	99,22	100,26
29.	Kunjungan Ibu hamil K4					
	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	5978	5869	6315	6106	5258
	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	7380	7508	7508	8645	7467
	Cakupan	81,00	78,17	84,11	70,63	70,42
30.	Pelayanan nifas					
	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6273	6196	6294	5959	5361
	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	7046	7166	7166	8252	7127
	Cakupan	89,03	86,46	87,83	72,21	75,22
31.	Neonatus dengan komplikasi yang ditangani					
	Jumlah neonates dengan komplikasi yang tertangani	491	495	517	373	383
	Jumlah seluruh neonitas dengan komplikasi yang ada	491	495	517	373	383
	Cakupan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
32.	Pelayanan anak balita					
	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	20849	18863	20981	21931	21949
	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	29306	29814	29831	30340	33029
	Cakupan	71,14	63,27	70,37	72,28	66,45
33.	Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat					
	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6499	6120	5356	5411	5787
	Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	7248	7058	6640	6344	6564
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	89,67	86,71	80,66	85,29	88,16
34.	Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam					
	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani >24 jam dalam periode tertentu	1	0	4	3	1
	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	1	0	4	3	1
	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan rencana pembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan perilaku pola hidup sehat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada masa yang akan datang, berdasarkan gambaran kondisi kesehatan daerah di Kabupaten Luwu dapat diidentifikasi permasalahan kesehatan sebagai isu –isu strategis adalah sebagai berikut:

❖ **Permasalahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah**

1. Terbatasnya tenaga kesehatan (rasio dokter gigi, perawat, bidan, perawat gigi, teknisi kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, nutrisisionis, keterampilan fisik dan teknisi medis belum mencapai target pemenuhan HAM aspek kesehatan.
2. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata.
3. Persentase Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (38.1%) belum terpenuhi
4. Jumlah Puskesmas belum memenuhi standar rasio terhadap jumlah penduduk (1:56971), guna memenuhi standar rasio Puskesmas (1:30.000 penduduk), masih diperlukan lebih kurang 19 Puskesmas.
5. Jumlah tenaga non Kesehatan yang tidak mencukupi sehingga tenaga Kesehatan merangkap sebagai tenaga administrasi.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN yang berakibat pada cakupan Universal Health Coverage (UHC)
7. Kebutuhan formasi sumber daya manusia kesehatan tidak terpenuhi
8. Masih terdapatnya kematian ibu dan bayi yang seharusnya dapat dicegah dengan peningkatan layanan pada ibu hamil dan bayi baru lahir.
9. Masalah Gizi masyarakat, masih terdapat kasus stunting, wasting dan underweight di wilayah Kabupaten Luwu.
10. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 0-11 bulan belum tercapai
11. Masih rendahnya cakupan deteksi dini kanker serviks dan payudara pada perempuan usia 30-50 tahun
12. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
13. Masih tingginya insident rate DBD

14. Masih ditemukannya kasus baru pada penyakit menular langsung (kusta) .

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu secara umum dengan memperhatikan permasalahan diatas yang mengacu pada renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2026. Maka dapatlah diidentifikasi isu-isu strategis yang akan menjadi landasan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya standar pelayanan minimal bidang kesehatan

Standar pelayanan minimal bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah daerah harus memperhatikan terkait standar pelayanan pada kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, kesehatan pada usia pendidikan dasar, kesehatan pada usia produktif, kesehatan pada usia lanjut, kesehatan penderita hipertensi, kesehatan penderita diabetes melitus, kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, kesehatan orang terduga tuberkulosis, kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus. Hal tersebut bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif pada kesehatan masyarakat.

2. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat

Dalam mendukung kesehatan ibu dan anak dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan kematian balita. Salah satu upaya yang dilakukan adalah optimalisasi penggunaan buku kesehatan ibu dan anak (KIA). Buku KIA memainkan peran penting sebagai alat berbasis rumah untuk memastikan kesehatan ibu dan anak yang berkelanjutan. Buku KIA merupakan panduan bagi keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk mengidentifikasi awal masalah kesehatan selama masa kehamilan dan masa kanak-kanak. Dengan demikian buku pegangan ini merupakan alat yang efektif untuk memantau penyediaan dan ketersediaan layanan kesehatan ibu dan anak yang esensial untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

3. Pencegahan Stunting

Stunting merupakan ancaman terhadap kualitas hidup, produktivitas dan daya saing bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sehubungan

hal tersebut pencegahan stunting merupakan salah satu isu strategis Kabupaten Luwu. Dalam pencegahan stunting diperlukan komitmen dan dukungan yang kuat dari pimpinan di semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan program pencegahan stunting berjalan efektif. Perlu juga dipastikan bahwa ketersediaan dan akses masyarakat terhadap makanan bergizi terutama bagi keluarga miskin dan rentan., serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan teruma tingkat puskesmas dan posyandu untuk memberikan pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu hamil dan anak-anak.

4. Penguatan Sistem Kesehatan

Percepatan penguatan dalam sistem kesehatan nasional dalam rangka percepatan mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat didefinisikan sebagai orang yang memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan, terlepas dari status keuangan. Akses ke layanan kesehatan berkualitas terus menjadi tantangan bagi banyak orang di negara berpenghasilan rendah dan menengah Tujuan penguatan system kesehatan ini adalah untuk memetakan strategi penguatan sistem kesehatan yang dapat digunakan untuk mencapai cakupan kesehatan universal. Langkah-langkah hasil termasuk infrastruktur fasilitas kesehatan, akses ke obat-obatan, dan sumber dukungan keuangan. Pembiayaan kesehatan dan pembangunan infrastruktur kesehatan adalah intervensi yang paling banyak dilaporkan. Hasilnya menunjukkan bahwa penguatan sistem kesehatan, yaitu melalui pembiayaan kesehatan, pengembangan, dan peningkatan infrastruktur kesehatan, dapat memainkan peran penting.

5. Pencegahan dan Pengendalian penyakit

Peningkatan pengendalian penyakit dimana perhatian khusus dan prioritas nasional adalah pada penyakit diabetes, hipertensi, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, serta penyakit kusta. Kebijakan operasional pencegahan dan pengendalian penyakit diarahkan untuk penyelesaian persoalan kematian ibu, kematian bayi dan stunting disamping penyakit menular dan tidak menular dengan pendekatan promotif dan preventif disteiap jenjang pelaksanaan

pemerintahan. Berbagai pendekatan promotif dan preventif dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit yang menjadi prioritas nasional. Tuberkulosis, Malaria dan Imunisasi. Sedangkan untuk Penyakit Tidak Menular, pendekatan promotif dan preventif yang dilakukan antara lain Penanganan Faktor Resiko, Penyediaan fasilitas aktivitas fisik dan atau olahraga dan Skrining dan penyuluhan serta Promosi Kesehatan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dan isu-isu strategis , maka dari itu terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi:

- a. Dinamika kebijakan atau regulasi moratorium sehingga menuntut sumber daya aparatur dinas kesehatan agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.
- b. Penugasan rangkapan tenaga fungsional kesehatan menjadi tenaga administrasi menyebabkan pencapaian kinerja tidak optimal
- c. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- d. Tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS masih rendah dan gaya hidup yang tidak sehat
- e. Kepesertaan masyarakat dalam penjaminan kesehatan atau BPJS belum optimal.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, provinsi, daerah dalam upaya mendukung program-program bidang kesehatan.
- b. Semakin banyaknya pelayanan kesehatan swasta dan segmen pasar dalam peningkatan penyelenggaraan kesehatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
- c. Kemudahan dalam komunikasi (via internet) untuk penanggulangan masalahmasalah kesehatan yang harus segera ditangani dan mempermudah koordinasi dengan lintas sektor terkait.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen rancangan awal RKPD Kabupaten Luwu serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan

target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka review terhadap rancangan awal rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KESEHATAN			172.474.848.961,00			172.474.848.961,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			172.474.848.961,00			172.474.848.961,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			172.474.848.961,00			172.474.848.961,00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	68.948.941.386,00		100 %	68.948.941.386,00		Sesuai
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	408.012.328,00		100 %	408.012.328,00		Sesuai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								Sesuai
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	191.499.793,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	2 Dokumen	191.499.793,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								Sesuai
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.028.350,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Dokumen	15.028.350,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.999.692,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.999.692,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								Sesuai
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.499.714,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Dokumen	10.499.714,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								Sesuai
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.999.785,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Dokumen	12.999.785,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Sesuai
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14.999.994,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Laporan	14.999.994,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Sesuai
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	149.985.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	1 Laporan	149.985.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan	100 %	66.738.218.908,00		100 %	66.738.218.908,00		Sesuai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Sesuai
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3500 Orang/bulan	66.166.537.904,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3500 Orang/bulan	66.166.537.904,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								Sesuai
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								Sesuai
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	39.999.773,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Laporan	39.999.773,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.999.746,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.999.746,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								Sesuai
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.681.485,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Laporan	29.681.485,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan admininistrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	40.600.000,00		100 %	40.600.000,00		Sesuai
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								Sesuai
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								Sesuai
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.600.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	1 Laporan	15.600.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	20.240.000,00		100 %	20.240.000,00		Sesuai
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								Sesuai
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	2 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								Sesuai
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	44 Orang	20.240.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Orang	20.240.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100 %	439.431.008,00		100 %	439.431.008,00		Sesuai
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Sesuai
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.981.322,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	1 Paket	4.981.322,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								Sesuai
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.977.063,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	4.977.063,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								Sesuai
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.486.132,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	18.486.132,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								Sesuai
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.999.792,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	9.999.792,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Sesuai
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Penyediaan Bahan/Material								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	13.999.348,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Paket	13.999.348,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu								Sesuai
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								Sesuai
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	349.987.351,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	349.987.351,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	58.671.844,00		-	58.671.844,00		Sesuai
	Pengadaan Mebel								Sesuai
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	13.825.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	3 Unit	13.825.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								Sesuai
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	44.846.844,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	1 Unit	44.846.844,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	869.200.000,00		100 %	869.200.000,00		Sesuai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								Sesuai
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	24.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								Sesuai
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	166.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	166.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								Sesuai
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	679.200.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	1 Laporan	679.200.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 %	374.567.298,00		70 %	374.567.298,00		Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Sesuai
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	199.987.298,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	199.987.298,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								Sesuai
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	24.580.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit	24.580.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								Sesuai
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 %	101.104.617.393,00		100 %	101.104.617.393,00		Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya	85 %	40.401.329.649,00		85 %	40.401.329.649,00		Sesuai
	Pembangunan Puskesmas								Sesuai
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	8.300.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	8.300.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Sesuai
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6 Unit	1.772.640.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	1.772.640.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	3.145.052.300,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	3.145.052.300,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengembangan Puskesmas								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	3.836.040.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	3.836.040.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Sesuai
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	21 Unit	1.687.356.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit	1.687.356.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas								Sesuai
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	14.373.768.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	14.373.768.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Sesuai
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Unit	630.311.630,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	630.311.630,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	1.000.012.859,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	1.000.012.859,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	1.494.600.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.494.600.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit	77.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Unit	77.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	4.050.953.860,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	4.050.953.860,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	5 Layanan	23.095.000,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	5 Layanan	23.095.000,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								Sesuai
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	10.500.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.500.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan	100 %	60.647.590.088,00		100 %	60.647.590.088,00		Sesuai
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								Sesuai
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	NA Orang	24.992.575,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	NA Orang	24.992.575,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								Sesuai
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5374 Orang	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5374 Orang	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								Sesuai
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5408 Orang	41.951.710,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5408 Orang	41.951.710,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								Sesuai
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28106 Orang	87.127.656,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	28106 Orang	87.127.656,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								Sesuai
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58889 Orang	140.839.802,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58889 Orang	140.839.802,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								Sesuai
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222198 Orang	95.774.790,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222198 Orang	95.774.790,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								Sesuai
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28540 Orang	30.120.430,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28540 Orang	30.120.430,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								Sesuai
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70524 Orang	21.396.700,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70524 Orang	21.396.700,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								Sesuai
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4432 Orang	408.676.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4432 Orang	408.676.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								Sesuai
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	871 Orang	19.408.350,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	871 Orang	19.408.350,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								Sesuai
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6579 Orang	470.008.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6579 Orang	470.008.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								Sesuai
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6579 Orang	17.610.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6579 Orang	17.610.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	68.365.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	68.365.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	17.075.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	17.075.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	21.495.360,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.495.360,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	12.138.350,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.138.350,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	674.724.010,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	674.724.010,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	14.870.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.870.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	99.983.670,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	99.983.670,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	na Orang	20.706.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	na Orang	20.706.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								Sesuai
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	na Orang	25.445.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	na Orang	25.445.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	986.676.930,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	986.676.930,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	52.000.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	52.000.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	NA Paket	24.962.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	NA Paket	24.962.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 Dokumen	300.001.940,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	300.001.940,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Operasional Pelayanan Puskesmas								Sesuai
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	4.249.999.619,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.249.999.619,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								Sesuai
		0	1 0	18.599.235,00	-	1 0	18.599.235,00	-	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								Sesuai
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	22 Unit	29.986.050,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	29.986.050,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	24.983.781,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	24.983.781,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	27.575.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	27.575.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								Sesuai
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								Sesuai
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA Orang	9.976.508,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	NA Orang	9.976.508,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA Orang	24.950.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	NA Orang	24.950.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								Sesuai
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	NA Orang	15.800.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	NA Orang	15.800.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok								Sesuai
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	29.990.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Tatanan	29.990.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								Sesuai
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	13.025.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	13.025.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota								Sesuai
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dokumen	124.992.212,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	124.992.212,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			Semua Kel/Desa			Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								Sesuai
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	243.376.734,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	243.376.734,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	24.997.333,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24.997.333,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik								Sesuai
		Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	24.999.849,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24.999.849,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji								Sesuai
		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	9.989.094,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	9.989.094,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi kesehatan yang terintegrasi	100 %	24.997.656,00		100 %	24.997.656,00		Sesuai
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	24.997.656,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	24.997.656,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin rumah sakit kelas C dan D yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	100 %	30.700.000,00		100 %	30.700.000,00		Sesuai
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	22 Unit	30.700.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	30.700.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	0,021 Angka 100 % 78,91 %	1.703.120.824,00		0,021 Angka 100 % 78,91 %	1.703.120.824,00		Sesuai
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin praktek tenaga kesetahatan yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	100 %	40.011.950,00		100 %	40.011.950,00		Sesuai
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	20.011.950,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.011.950,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKm dan UKP	100 %	202.586.445,00		100 %	202.586.445,00		Sesuai
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	202.586.445,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	202.586.445,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang telah mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi	100 %	1.460.522.429,00		100 %	1.460.522.429,00		Sesuai
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Sesuai
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1500 Orang	1.460.522.429,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1500 Orang	1.460.522.429,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	100 %	442.259.717,00		100 %	442.259.717,00		Sesuai
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, (UMOT) yang telah mendapat izin	100 %	160.989.306,00		100 %	160.989.306,00		Sesuai
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	160.989.306,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	160.989.306,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi	Jumlah Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang telah diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	230 Produk	81.545.865,00		230 Produk	81.545.865,00		Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	oleh Industri Rumah Tangga								
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	81.545.865,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	81.545.865,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan	-	-	30.730.400,00		-	30.730.400,00		Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Depot Air Minum (DAM)								
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	30.730.400,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.730.400,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	168.994.146,00		-	168.994.146,00		Sesuai
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	71 Unit	168.994.146,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71 Unit	168.994.146,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	100 %	275.909.641,00		100 %	275.909.641,00		Sesuai
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22 Kelompok	133.984.589,00		22 Kelompok	133.984.589,00		Sesuai
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								Sesuai
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	133.984.589,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	133.984.589,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat	-	-	34.645.052,00		-	34.645.052,00		Sesuai

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Kabupaten/Kota								
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	34.645.052,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	34.645.052,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan UKBM	100 %	107.280.000,00		100 %	107.280.000,00		Sesuai
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								Sesuai
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	107.280.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	107.280.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
				172.474.848.961,00			172.474.848.961,00		

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Salah satu tahapan proses perencanaan dan penganggaran juga memberikan ruang kepada para pemangku kepentingan, LSM, Asosiasi- Asosiasi, Perguruan Tinggi dan Ornasisasi profesi untuk mengusulkan program dan kegiatannya kepada Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan diusulkan secara elektronik melalui aplikasi Sisten Informasi Pembangunan Daerah, selanjutnya usulan tersebut di verifikasi dan divalidasi. Usulan program dan kegiatan dari Masyarakat disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota, Setelah usulan yang telah didapat melalui Musrenbang Kecamatan selanjutnya u dianalisa dan disesuaikan dengan juknis dan data lapangan yang ada, kemudian Dinas Kesehatan menyelenggarakan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Luwu yang dihadiri pemangku kepentingan dan hasil forum tersebut menyepakati :

1. Program dan kegiatan prioritas, dan indicator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Kabupaten
2. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah dari 169 usulan kecamatan, Dinas Kesehatan Menerima 82 usulan,menolak 87 usulan.

Adapun usulan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Progran dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Luwu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100%		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya	85%		
1	Pembangunan Puskesmas (Renovasi/penambahan ruang puskesmas)	Walenrang Barat		1 Unit		7.643.600.000,00
2	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Larompong, Padang Kalua, Pantilang, Sampano, dan Taba		5 Unit		2.289.330.000,00
3	Pembangunan Rumah Medis			1 Unit		53.587.600,00
4	Penambahan ruang puskesmas	Bua		1 Unit		2.300.045.400,00
5	Penambahan ruang puskesmas	Ponrang Selatan		1 Unit		1.449.172.300,00
6	Penataan halaman puskesmas	Larompong selatan, lamasi, ponrang, sulisulawesi barat		4 Unit		944.236.654,00
7	Pembangunan pagar puskesmas	Bajo, bua, lamasi timur, larompong selatan		4 Unit		794.512.400,00
8	Penataan halaman pustu	Parekaju		1 Unit		100.700.000,00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan	PAGU
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
9	Pembangunan pagar pustu	Tongkonan, barowa, bosso timur, bukit harapan, bululondong, puty, Kaili, Kaladi, Karang-karangan. Kendekan, Komba, Kurusumanga, pasar baru, seppong, tampumia. To'katapang, Tongkajang		17 Pustu		2.405.369.000,00
10	Rehabilitasi Puskesmas Larompong	Larompong		1 Unit		1.565.966.000,00
11	Rehabilitasi Pustu	Bonepute, Bassiang, Buntu batu, Bastem, Buntu sarek, Buntutallang, Jenne Maeja, Komba selatan, La'loa, Lamunre, Lauwa, Lempomajang, Muhajirin, Muladimeng, Padang Makbud, Palakka, Pammesakang, Radda, Raja, Salujambu, Salu Pao, Salu Paremang, Sampa, Senga Selatan, Sepon, Tanjong, Tibussan, Tirowali, Tobalo, Tobbia, Tumale, Ulusalu, Walenna, Binturu, Cakkeawo, kadong-kadong, kendekan, makalua-kadundung, malewong, pammanu, pangi, rantebelu, sinaji, dan Uraso		44 Pustu		6.628.014.640,00
12	Pengadaan alat kedokteran umum	Belopa				1.256.206.800,00
13	Pengadaan alat kesehatan kedokteran gigi	Belopa				1.496.720.000,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan kegiatan pada TA. 2025, Rehab/pembangunan yang dilaksanakan sesuai dari data dukung bahwa di beberapa puskesmas, pustu dan polindes yang sudah tidak layak untuk melaksanakan pelayanan maka itu perlu dilakukan rehab fisik dan pembangunan agar dapat melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top_down), dan bawah-atas (bottom-up). Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2025, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020- 2025 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 - 152 - 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2025, guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2025, menjadi misi Kementrian Kesehatan yaitu meningkatkan kesehatan reproduksi, ibu,

anak, dan remaja, perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, pembudayaan GERMAS, serta memperkuat sistem kesehatan.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2025 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2025: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

5. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
6. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh
7. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE).

Selanjutnya, Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan, Komitmen tersebut didasari atas Visi Presiden yaitu untuk mewujudkan

masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan, terdiri atas 6 Pilar transformasi penopang kesehatan indonesia :

1. Transformasi Layanan Primer Transformasi Layanan Primer adalah pelayanan kesehatan yang difokuskan ke arah pencegahan, Transformasi ini adanya di Puskesmas dan Posyandu , terdiri atas :
 - a. Edukasi Penduduk
 - b. Pencegahan Primer
 - c. Pencegahan Sekunder
 - d. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Layanan Primer
2. Transformasi Layanan Rujukan; Transformasi Layanan Rujukan bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier sehingga terbitnya pemerataan pelayanan kesehatan diseluruh Indonesia, Transformasi ini dilaksanakan dalam bentuk pembungan Rumah Sakit di Kawasan Timur, Jejaring Pengampuan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan World's top healthcare centers.
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan Transformasi Sistem Kesehatan Kesehatan bertujuan meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan (produksi hingga distribusi farmalkes yang lancar), serta memperkuat ketahanan tanggap darurat.
4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan yaitu tersedia, cukup dan berkelanjutan ; alokasi yang adil dan pemanfaatan yang efektif dan efisien sehingga dapat mempermudah dan kesetaraan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang kuirang mampu.
5. Transformasi SDM Kesehatan Trasformasi SDM Kesehatan memastikan distribusi tenaga kesehatan merata di seluruh Indonesia, dengan dilakukan penambahan kuota mahasiswa beasiswa dalam & luar negeri,
6. Transformasi teknologi kesehatan Transformasi teknologi kesehatan berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.

Berdasarkan 6 Pilar Transformasi tersebut Kementerian Kesehatan Menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan seperti pada bagan berikut ini :

Gambar 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan



Salah satu acuan penting dalam RPJMN ialah sasaran pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari 17 indikator yang kemudian dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Kesehatan sesuai pada konteks dan level indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Angka kematian ibu (per 100.000 KH)
2. Angka kematian bayi (per 1.000 KH)
3. Angka kematian neonatal (per 1.000 KH)
4. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
5. Prevalensi stunting pada balita (%)
6. Prevalensi wasting pada balita (%)
7. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
8. Insidensi TB (per 100.000 penduduk)
9. Eliminasi malaria (kabupaten/kota)
10. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)
11. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18
12. Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)
13. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)
14. Persentase RS terakreditasi (%)
15. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)
16. Persentase puskesmas tanpa dokter (%)
17. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)

Pembangunan kesehatan nasional berada dalam konteks lingkungan dan isu strategis terkait dengan pemenuhan layanan dasar, dengan berbagai isu di dalamnya dari kesehatan ibu dan anak, Kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi, sistem rujukan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Khusus terkait dengan bidang kesehatan, RPJMN 2020-2025 merumuskan arah kebijakan, yaitu “Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi Arah kebijakan kesehatan nasional tersebut di atas kemudian dirincikan menjadi lima strategi kesehatan nasional yaitu:

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi, dengan cakupan :

- a. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana;
 - b. Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia dan diare;
 - c. Perbaikan gizi anak, remaja putri dan ibu hamil; Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, yang mencakup:
- a. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan, dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - b. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi
 - c. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
 - d. Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti termasuk fortifikasi pangan;
 - e. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach);
 - f. Penguatan sistem surveilans gizi;
 - g. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
 - h. Respons cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

3. Peningkatan pengendalian penyakit

Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus padajantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, dan gangguan penglihatan. Selengkapnya strategi ini mencakup :

- a. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit utama, seperti diet tidak sehat, merokok, kurang aktivitas fisik, menggunakan tembakau dan alkohol; termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok;
 - b. Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan sistem kewaspadaan dini (early warning systems) kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;
 - c. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan
 - d. Pengendalian resistensi antimikroba;
 - e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.
- ### 4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang mencakup:
- a. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;
 - b. Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik;
 - c. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, terutama terkait rokok, produk pangan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;
 - d. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif terutama dalam pembudayaan olahraga, konsumsi gizi seimbang, anti rokok, skrining kesehatan, imunisasi, kepatuhan pengobatan, dan perilaku menjaga sanitasi

dan kebersihan lingkungan, pemberdayaan dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat;

- e. Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan;

f. Penguatan Sistem Kesehatan

1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, yang difokuskan pada:

- a. Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta
- b. Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga;
- c. Revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya;
- d. Pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan), termasuk system rujukan, pola pembiayaan, regulasi dan kelembagaan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia;
- f. Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
- g. Pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (alkes) yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
- h. Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan Kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan daring termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis daring;
- i. Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying dan sailing health care) dan gugus pulau;
- j. Pengembangan dan peningkatan kualitas RS Khusus; dan

- k. Penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, yang difokuskan pada:
- a. Penguatan perencanaan kebutuhan dan pemetaan tenaga kesehatan secara integratif antara pusat dan daerah sebagai dasar untuk penyediaan dan pemenuhan sumber daya manusia
 - b. Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/pendukung termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang/pendukung, farmasi dan alkes);
 - c. Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
 - d. Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - e. Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
 - f. Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
 - g. Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;
 - h. Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar; dan
 - i. Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alkes, yang difokuskan pada:
- a. Efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk;
 - b. Penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik;

- c. Peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional
 - d. Pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin dalam negeri bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences; dan
 - e. Pengembangan produksi dan sertifikasi alkes untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri
4. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan, yang difokuskan pada:
- a. Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
 - c. Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single- entry;
 - d. Penguatan data rutin;
 - e. Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, termasuk big data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan;
 - f. Peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotive dan preventif berbasis bukti;
 - g. Pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai (selain tembakau dan alkohol) dan pajak, pembiayaan bersumber masyarakat, dan kerjasama pemerintah dan swasta;
 - h. Peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah;
 - i. Penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN

3.2.1 TUJUAN

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan effort dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Tujuan yang ingin dicapai kabupaten luwu selama periode renstra tahun 2025-2026 adalah **Meningkatnya Pelayanan Kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu**

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur. Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas, perlu ditetapkan sasaran yang menjabarkan tujuan yang ingin dicapai berupa indikator dan targetnya. Sasaran suatu pernyataan yang mengandung unsur SMART (Spesifik, Measurable, Attributable, Reliable, dan Timely) yang memiliki tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran pada Dua tahun mendatang. Untuk itu dirumuskan sasaran pembangunan kesehatan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan **Meningkatnya kesehatan masyarakat**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunandan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu bersadarkan pada Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Luwu tahun 2025-2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.

Meningkatkan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan kesehatan yang mampu diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tahun 2025-2026, Sebagai Berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	s/d 2026
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan		Indeks	0.850	0.851	0.852	0.853	0.853
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan Hidup	Usia Harapan Hidup (UHH) adalah jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang	Tahun	71,04	71.10	71.15	71.20	71.20

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja dan pendanaan pada Rencana kerja tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah maupun menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan tahun 2025. Hal ini juga mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pelayanan wajib pemerintahan bidang kesehatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan dinas kesehatan kabupaten luwu tahun 2025 adalah sebagai berikut:

:

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencakup beberapa sub kegiatan diantaranya :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan nya meliputi :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - d) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Kegiatan ini terdiri dari:
 - a) Sub kegiatan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah,.
 - b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - b) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin lainnya;
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g) Sub Kegiatan Penyediaan bahan dan material
- h) Fasilitas kunjungan tamu.
- i) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan jasa surat menyurat
 - c) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Usuran pemerintahan bidang kesehatan. Pada Tahun 2025 Dinas Kesehatan mengusulkan Usuran wajib sebanyak 4 (Empat) Program wajib, 14 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

❖ PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program ini mendukung Upaya Kesehatan dalam bentuk Penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan maupun Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat secara langsung. Program ini terdiri dari empat Kegiatan dan empat puluh lima sub kegiatan seperti yang dijabarkan dibawah ini.

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - b) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 - c) Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas
 - d) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - e) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - f) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - g) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - h) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 - i) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- j) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin Perencanaan obat dan perbekalan Kesehatan.
 - k) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
 - l) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
- a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Masa Hamil
 - b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.
 - d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.
 - e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.
 - f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.
 - i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - n) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - o) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upaya kesehatan kerja
 - p) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - q) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya.
 - r) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - s) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 - t) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
 - u) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular
 - v) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 - w) Operasional Pelayanan Puskesmas.
 - x) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.
- a. Sub Kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari:
- a. Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

❖ **ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**

Program ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

❖ PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia kesehatan terdiri dari tiga kegiatan dan empat sub kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota:
 - a. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

❖ PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu :

- Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT):
 - a. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT),
 - b. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga:
 - a. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan

Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga .

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan tahun 2025 sebagaimana termuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan dan Penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						DINAS KESEHATAN							155.702.125.153,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							155.702.125.153,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							155.702.125.153,00
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %				100 %	69.581.200.000,00
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %				100%	165.000.000,00
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	191.499.793,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	0,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
	2	1	1		2		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.028.350,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	0,00
	1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
	2	1	1		3		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.999.692,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	0,00
	1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
	2	1	1		4		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.499.714,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	0,00
	1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
	2	1	1		5		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.999.785,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	0,00
	1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	2	1	1		6								

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14.999.994,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		2	1	1	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	149.985.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	150.000.000,00
	1	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan	100 %	66.738.218.908,00			100%	67.542.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		2	1	2	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3500 Orang/bulan	66.166.537.904,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3500 Orang/bulan	67.000.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
		2	1	2	3								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Dokumen	500.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		2	1	2	5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	39.999.773,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Laporan	40.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
		2	1	2	6		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.999.746,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Dokumen	2.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		2	1	2	7		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.681.485,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	0,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	0 2	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan admininstrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	40.600.000,00			100%	40.600.000,00
	1	0 2	0 1	2.0 3	000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
	1	0 2	0 1	2.0 3	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.600.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	15.600.000,00
	1	0 2	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan admininstrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	20.240.000,00			100%	130.000.000,00
	1	0 2	0 1	2.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	2 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Orang	100.000.000,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						
	1	0	0	2.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		2	1	5	0		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang	20.240.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Orang	30.000.000,00
	1	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100 %	439.431.008,00			100%	451.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		2	1	6	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.981.322,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Paket	5.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		2	1	6	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.977.063,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Paket	5.000.000,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	2	1	6	4			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.486.132,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	30.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
	2	1	6	5			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.999.792,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		10.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
	2	1	6	6			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Dokumen	12.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan/Material							
	2	1	6	7			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	13.999.348,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Paket	14.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
	2	1	6	8									

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Laporan	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		2	1	6	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	349.987.351,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Laporan	350.000.000,00
	1	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	58.671.844,00			100%	60.000.000,00
		2	1	7									
	1	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel							
		2	1	7	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	13.825.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		2	1	7	6								

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	44.846.844,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	5 Unit	45.000.000,00
	1	0 2	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	869.200.000,00			100%	752.600.000,00
	1	0 2	0 1	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Laporan	16.800.000,00
	1	0 2	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	166.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1 Laporan	185.000.000,00
	1	0 2	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	679.200.000,00	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	1 Laporan	550.800.000,00
	1	0 2	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 %	374.567.298,00			75%	440.000.000,00
	1	0 2	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	199.987.298,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	7 Unit	200.000.000,00
	1	0 2	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	24.580.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	30 Unit	40.000.000,00
	1	0 2	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL		200.000.000,00
2	1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 %	101.104.617.393,00			100 %	83.533.745.240,00
	1	0 2	0 2	2.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya	85 %	40.401.329.649,00			90%	24.025.000.000,00
	1	0 2	0 2	2.0 1	000 2	Pembangunan Puskesmas							

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	8.300.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER- PENGUATAN SISTEM KESEHATAN		0,00
	1	0 2	0 2	2.0 1	000 3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6 Unit	1.772.640.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER- PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	3 Unit	1.500.000.000,00
	1	0 2	0 2	2.0 1	000 4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	3.145.052.300,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	1 Unit	1.000.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pengembangan Puskesmas							
		2	2	1	6		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	3.836.040.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER- PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	2 Unit	5.000.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
		2	2	1	7		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	21 Unit	1.687.356.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	5 Unit	0,00
	1	0	0	2.0	000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas							
		2	2	1	9								

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	14.373.768.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	2 Unit	5.000.000.000,00
	1	0	0	2.0	001	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
		2	2	1	0		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Unit	630.311.630,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	5 Unit	2.500.000.000,00
	1	0	0	2.0	001	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							
		2	2	1	1		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	1.000.012.859,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN		1.500.000.000,00
	1	0	0	2.0	001	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
		2	2	1	4		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	1.494.600.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN		7.000.000.000,00
	1	0	0	2.0	002	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
		2	2	1	0								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit	77.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		250.000.000,00
	1	0	0	2.0	002	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							
		2	2	1	3		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	4.050.953.860,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK , DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		0,00
	1	0	0	2.0	002	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)							
		2	2	1	5								

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	5 Layanan	23.095.000,00	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Walenrang Barat, Semua Kel/Desa Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN		30.000.000,00
	1	0 2	0 2	2.0 1	002 6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	10.500.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB		245.000.000,00
	1	0 2	0 2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan	100 %	60.647.590.088,00			100%	59.453.745.240,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	1	0	0	2.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
		2	2	2	1		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	NA Orang	24.992.575,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	5572 Orang	30.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
		2	2	2	2		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5374 Orang	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	5374 Orang	104.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
		2	2	2	3		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5408 Orang	41.951.710,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	5408 Orang	43.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
		2	2	2	4								

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28106 Orang	87.127.656,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN		90.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
		2	2	2	5		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58889 Orang	140.839.802,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	58899 Orang	30.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
		2	2	2	6		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222198 Orang	95.774.790,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	222198 Orang	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
		2	2	2	7		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28540 Orang	30.120.430,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	222198 Orang	30.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
		2	2	2	8								

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70524 Orang	21.396.700,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	70524 Orang	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
		2	2	2	9		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4432 Orang	408.676.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	4432 Orang	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
		2	2	2	0		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	871 Orang	19.408.350,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	871 Orang	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
		2	2	2	1		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6579 Orang	470.008.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	6579 Orang	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
		2	2	2	2								

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6579 Orang	17.610.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	8672 Orang	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)							
		2	2	2	3		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	68.365.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN		92.000.000,00
	1	0	0	2.0	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana							
		2	2	2	4		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	17.075.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
		2	2	2	5		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	21.495.360,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	0	0	2.0	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
		2	2	2	6		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	12.138.350,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK		20.000.000,00
	1	0	0	2.0	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
		2	2	2	7		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	674.724.010,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	1 Dokumen	230.000.000,00
	1	0	0	2.0	001	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
		2	2	2	8		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	14.870.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	1 Dokumen	35.000.000,00
	1	0	0	2.0	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya							
		2	2	2	9								

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	002	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
		2	2	2	0		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	99.983.670,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
		2	2	2	1		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	na Orang	20.706.200,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	871 Orang	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA							
		2	2	2	2		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	na Orang	25.445.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	NA Orang	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	002	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
		2	2	2	5								

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	986.676.930,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	1 Dokumen	350.000.000,00
	1	0 2	0 2	2.0 2	002 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	52.000.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1 Dokumen	52.000.000.000,00
	1	0 2	0 2	2.0 2	002 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional							
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	NA Paket	24.962.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	5 Paket	25.000.000,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	0	0	2.0	002	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat							
		2	2	2	9		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 Dokumen	300.001.940,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	7 Dokumen	350.000.000,00
	1	0	0	2.0	003	Operasional Pelayanan Puskesmas							
		2	2	2	3		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	4.249.999.619,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	1 Dokumen	4.250.000.000,00
	1	0	0	2.0	003	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
		2	2	2	4		0	1 0	18.599.235,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		18.600.000,00
	1	0	0	2.0	003	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							
		2	2	2	5		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	22 Unit	29.986.050,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	22 Unit	30.000.000,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
										Semua Kel/Desa			
	1	0 2	0 2	2.0 2	003 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	24.983.781,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK		25.000.000,00
	1	0 2	0 2	2.0 2	003 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	27.575.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00
	1	0 2	0 2	2.0 2	003 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	1 Unit	350.000.000,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	0	0	2.0	004	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
		2	2	2	0		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA Orang	9.976.508,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	11303 Orang	480.000.000,00
	1	0	0	2.0	004	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
		2	2	2	1		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA Orang	24.950.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	102 Orang	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	004	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
		2	2	2	2		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	NA Orang	15.800.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	NA Orang	37.755.240,00
	1	0	0	2.0	004	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok							
		2	2	2	3		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	29.990.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	7 Tatanan	30.000.000,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	0	0	2.0	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
		2	2	2	4		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	13.025.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota							
		2	2	2	5		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	124.992.212,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	125.000.000,00
	1	0	0	2.0	004	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
		2	2	2	6		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	243.376.734,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		243.390.000,00
	1	0	0	2.0	004	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
		2	2	2	8		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	24.997.333,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	0	0	2.0	004	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik							
		2	2	2	9		Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	24.999.849,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	25.000.000,00
	1	0	0	2.0	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji							
		2	2	2	0		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	9.989.094,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	10.000.000,00
	1	0	0	2.0		Penyelenggaraan	Persentase Sistem Informasi kesehatan yang terintegrasi	100 %	24.997.656,00			100%	25.000.000,00
		2	2	3		Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							
	1	0	0	2.0	000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
		2	2	3	2		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	24.997.656,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	1 Dokumen	25.000.000,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	0 2	0 2	2.0 4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin rumah sakit kelas C dan D yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	100 %	30.700.000,00			100%	30.000.000,00
	1	0 2	0 2	2.0 4	000 3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	22 Unit	30.700.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	22 Unit	30.000.000,00
3	1	0 2	0 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	0,021 Angka 100 % 78,91 %	1.703.120.824,00			100% 79,56% 0,027Angka	1.742.644.000,00
	1	0 2	0 3	2.0 1		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin praktek tenaga kesehatan yang diselesaikan proses penerbitan izinnya	100 %	40.011.950,00			100%	40.000.000,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	0	0	2.0	000	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							
		2	3	1	1		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	20.011.950,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	1 Dokumen	20.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							
		2	3	1	2		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN		20.000.000,00
	1	0	0	2.0		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKm dan UKP	100 %	202.586.445,00			100%	202.644.000,00
	1	0	0	2.0	000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
		2	3	2	3		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan	1 Dokumen	202.586.445,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNY		202.644.000,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Sumber Daya Manusia Kesehatan			Semua Kel/Desa	A BIDANG KESEHATAN		
	1	0 2	0 3	2.0 3		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang telah mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi	100 %	1.460.522.429,00			100%	1.500.000.000,00
	1	0 2	0 3	2.0 3	000 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1500 Orang	1.460.522.429,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	150 Orang	1.500.000.000,00
4	1	0 2	0 4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	100 %	442.259.717,00			100 %	677.220.030,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	0 2	0 4	2.0 1		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, (UMOT) yang telah mendapat izin	100 %	160.989.306,00			100%	345.000.000,00
	1	0 2	0 4	2.0 1	000 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	160.989.306,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1 Dokumen	345.000.000,00
	1	0 2	0 4	2.0 3		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Jumlah Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang telah diterbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	230 Produk	81.545.865,00			230Produk	81.549.015,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
	1	0	0	2.0	000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	81.545.865,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1 Dokumen	81.549.015,00
	1	0	0	2.0		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran	-	-	30.730.400,00			75%	81.549.015,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						dan Depot Air Minum (DAM)							
	1	0 2	0 4	2.0 4	000 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	30.730.400,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN	150 Dokumen	81.549.015,00
	1	0 2	0 4	2.0 6		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	168.994.146,00			-	169.122.000,00
	1	0 2	0 4	2.0 6	000 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	71 Unit	168.994.146,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		169.122.000,00
5	1	0 2	0 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang telah menerapkan PHBS	100 %	275.909.641,00			100 %	167.315.883,00
	1	0 2	0 5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22 Kelompok	133.984.589,00			22Kelompok	25.000.000,00
	1	0 2	0 5	2.0 1	000 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	133.984.589,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNY A BIDANG KESEHATAN		25.000.000,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	0	0	2.0		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	34.645.052,00			100%	35.000.000,00
	1	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							
		2	5	2	1		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	34.645.052,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	1 Dokumen	35.000.000,00
	1	0	0	2.0		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan UKBM	100 %	107.280.000,00			100%	107.315.883,00
	1	0	0	2.0	000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
		2	5	3	1		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	107.280.000,00	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	1 Dokumen	107.315.883,00

N o	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	J U M L A H				172.474.848.961,0 0				155.702.125.153,0 0

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas–tugas dan kegiatan kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025. Tingkatan keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta sebagai acuan dalam menyusun program/Kegiatan pembangunan dalam kerangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan:

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tahun 2025 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung target-target pembangunan.

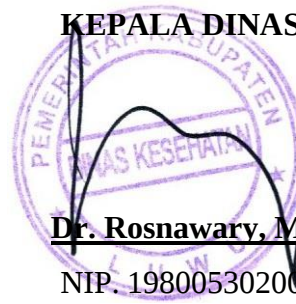
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekertariat, bidang-bidang dan seluruh staf dinas kesehatan Kabupaten Luwu secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - Melaksanakan renja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya
 - Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan dokumen pelaksanaan anggaran
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan renja tahun 2025.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEPALA DINAS KESEHATAN



Dr. Rosnawary, M.Tr, Adm.Kes

NIP. 198005302006042009

